BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konsep Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu, suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Definisi kesejahteraan menurut Suharto (2014: 1) menyatakan bahwa:

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dalam peningkatan kualitas hidup, kelompok dan masyarakat.

Definisi diatas menjelaskan bahwa suatu institusi atau bidang yang melibatkan aktivitas terorganisasi baik dari lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta bertujuan untuk mencegah, mengatasi, memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dalam peningkatan kualitas hidup kelompok dan masyarakat. Selain itu juga menurut Friedlender dalam Suud (2006: 8) menyatakan bahwa:

Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang berisikan pelayanan sosial dimana sistem tersebut memberikan rasa sejahtera kepada individu, kelompok, maupun masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Keadaan sosial yang sejahtera adalah setiap masing-masing individu, kelompok, dan masyarakat merasakan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik secara psikis, fisik, dan sosial untuk dapat melakukan sesuai dengan perannya masing-masing.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dijelaskan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 dalam Fahrudin (2012: 10) bahwa: “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Dalam hal tersebut kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan psikis termasuk rasa aman, rasa cinta, dan kasih sayang. Sosial dalam hal ini adalah suatu keadaan individu bisa melaksanakan perannya dalam masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan kesejahteraan sosial memiliki makna yang relative berbeda. Menurut Suharto (2014: 2) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jamaniah, rohaniah, dan sosial.
- b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai kearah kehidupan yang lebih baik.

Menurut Fahrudin (2012: 10) tujuan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangka taraf hidup yang memuaskan.

Berdasarkan hal tersebut menyatakan bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial adalah tercapainya standar kehidupan yang layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidupnya mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan hingga pendidikan. Selain itu dapat menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonmi serta menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan sosial.

Selain itu, menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012: 10) menyatakan bahwa ada tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan definisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang maupun kelompok. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial tersebut meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan, dan kesempatan untuk mempergunakan sumber-sumber dan

kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan.

b. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu yang meliputi: mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok kerja dan kelompok lain dalam masyarakat.

c. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

Berdasarkan hal tersebut tujuan kesejahteraan sosial merupakan pelaksanaan pada program-program kesejahteraan sosial, misalnya program-program pengembangan masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak yang semuanya bertujuan untuk mencapai sasaran pemeliharaan, kontrol dan perubahan yang membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai keadaan yang baik secara fisik, mental dan sosial agar terpenuhinya standar kehidupan pokok yang dibutuhkan dalam masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, tentunya juga memiliki fungsi-fungsi yang sangat berkaitan erat terhadap keberfungsian sosial dalam kehidupan. Selain itu, kesejahteraan sosial juga

memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan penyesuaian sosial dan relasi sosial sehingga diharapkan peranan-peranan sosial yang terganggu karena adanya perubahan dapat kembali sesuai dengan yang diinginkan dan keberfungsian sosial masyarakat dapat kembali normal. Menurut Friedlander dalam Fahrudin (2012: 12) fungsi-fungsi kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- a. Fungsi pencegahan (*Preventive*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- b. Fungsi penyembuhan (*Curative*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
- c. Fungsi pengembangan (*Development*)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- d. Fungsi penunjang (*Support*)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, fungsi kesejahteraan sosial tersebut melakukan pencegahan untuk memperkuat individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat terhindar dari masalah sosial serta menghilangkan kondisi ketidakmampuan dalam diri untuk bisa berfungsi kembali. Dengan adanya fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut, individu, kelompok, dan masyarakat seharusnya bisa lebih memanfaatkan kemampuan diri mereka di lingkungannya agar dapat berfungsi sosial secara maksimal.

2.1.4 Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial sebagai suatu upaya yang sistematis untuk mencapai derajat sejahtera. Pelayanan sosial diharapkan menjadi implementasi dan langkah teknis dari upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan peningkatan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat sehingga terciptanya suatu kondisi yang sejahtera. Menurut Khan dan Kamerman (2012: 50) menyatakan pelayanan sosial bahwa:

Lima pelayanan sosial dasar adalah pendidikan, transfer penghasilan (yang sering disebut sebagai jaminan sosial), kesehatan, perumahan dan ketermapilan kerja. Selanjutnya sistem keenam yang baru muncul adalah pelayanan sosial personal (*personal social services*) atau disebut juga sebagai pelayanan sosial umum (*general social services*).

Pelayanan sosial bertujuan untuk membantu warga masyarakat yang diakibatkan oleh ketidakmampuan individu, kelompok dan masyarakat menjalankan fungsi-fungsinya sehingga mengalami masalah yang memungkinkan menghambat peran sosialnya di lingkungan masyarakatnya tersebut. Dalam arti luas mengenai pelayanan sosial menurut Khan dalam Fahrudin menyatakan bahwa:

Social services may be interpreted in an institutional context as consisting of programs made available by other than market criteria to assure a basic level of health-education-welfare provision, to enhance communal living and individual functioning, to facilitate access to services and institutions generally, and to assist those in difficulty and need.

Pelayanan sosial dapat ditafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk

memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut, pemberian pelayanan sosial tidak berdasarkan pada kemampuan orang untuk membayar tetapi didasarkan atas kebutuhan, sehingga walaupun orang tidak mampu membayar, tetap akan diberi pelayanan yang dibutuhkannya. Seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, pelatihan kerja untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian orang-orang.

Pelayanan sosial juga diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan, atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, penanaman nilai dan pengembangan hubungan sosial. Pelayanan sosial cenderung menjadi pelayanan yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus. Menurut Fahrudin (2012: 54) menyatakan bahwa fungsi-fungsi pelayanan sosial, yaitu:

- (1) Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan, (2) Pelayanan-pelayanan untuk terap, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti, (3) Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat.

Dalam hal tersebut pelayanan sosial membantu klien dalam menangani masalah yang dialami untuk memperoleh informasi dan akses yang berkaitan dengan masalahnya. Pelayanan sosial juga dilakukan sebagai sosialisasi dan pengembangan agar pelayanan-pelayanan ini dapat membantu seluruh masyarakat dalam menangani

masalahnya, sehingga dapat memberikan pertolongan segera melalui pelayanan seperti terapi, rehabilitasi dan perlindungan sosial.

2.1.5 Komponen-Komponen Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik lagi, oleh sebab itu, kesejahteraan sosial dapat diupayakan melalui pelayanan sosial atau dalam bentuk kegiatan. Semua kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain. Menurut Fahrudin (2012: 16), menyatakan bahwa komponen-komponen dalam kesejahteraan sosial antara lain:

1. Organisasi formal
Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi atau badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.
2. Pendanaan
Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber (*fundraising*) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan semata-mata.
3. Tuntutan kebutuhan manusia
Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.
4. Profesionalisme
Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara professional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis dan menggunakan metode dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.
5. Kebijakan/perangkat hukum/perundang-undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan, dan pengakhiran pelayanan.

6. Peranserta masyarakat
Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peranserta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat bagi masyarakat.
7. Data dan informasi kesejahteraan sosial
Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayannya akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai komponen-komponen kesejahteraan sosial dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan berbagai pihak untuk mendukung kegiatan tersebut. Seperti halnya melakukan kegiatan pelatihan atau bantuan bagi pekerja migran membutuhkan suatu wadah organisasi agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan terencana dan terstruktur.

2.2 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang memiliki kegiatan professional dalam membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka. Sehingga mereka dapat berfungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Menurut Siporin dalam Fahrudin (2012: 61) menyatakan bahwa: “Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan

masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka”.

Berdasarkan penjelasan tersebut pekerjaan sosial sebagai metode untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat memecahkan masalah sosial yang mereka miliki. Selain itu juga mencegah terjadinya masalah sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Menurut Soetarso dalam Huraerah (2011: 39) menyatakan pekerjaan sosial bahwa:

Sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal balik yang saling menguntungkan antara orang dan lingkungan sosialnya (perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas dan masyarakat) untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai satu kesatuan harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, pekerjaan sosial merupakan pertolongan yang diberikan kepada individu, kelompok dan masyarakat guna meningkatkan kemampuan berfungsi sosial agar individu, kelompok dan masyarakat menjadi mandiri. Fokus pekerjaan sosial adalah untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pekerjaan Sosial

Tujuan umum praktik pekerjaan sosial adalah perubahan yang terkendali dan berencana dalam beberapa sistem kepribadian individu dan sistem sosial. Pekerja sosial adalah profesi pertolongan. Tujuan utama pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama untuk populasi

yang rentan. Menurut Pujileksono (2018: 19) menyatakan bahwa tujuan pekerjaan sosial meliputi:

1. Mengembangkan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah (*to enhance problem-solving and coping capacities of people*).
2. Menhubungkan orang dengan sistem sehingga dapat menyediakan sumber, pelayanan dan kesempatan (*link people with systems that provide them with resources, services and opportunities*).
3. Meningkatkan efektivitas operasional sistem secara manusiawi (*promote the effective and humane operation of the systems*).
4. Memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyempurnaan perumusan dan implementasi kebijakan sosial (*contribute of the development and improvement of social policy*).

Pekerja sosial harus bisa membangun kemampuan klien untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi, pekerja sosial juga membantu menghubungkan klien ke pelayanan sosial lembaga untuk diberikan pemecahan masalahnya, menyampaikan masukan-masukan kepada pelayanan sosial lembaga untuk memperbaiki keefektifan pelayanan tersebut, serta membantu mengembangkan dan memperbaiki kebijakan-kebijakan sosial, baik kebijakan dari pemerintah maupun kebijakan dari lembaga.

Pekerjaan sosial memiliki misi dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Misi pekerjaan sosial tersebut diterjemahkan menjadi tujuan pekerjaan sosial yang memberikan arah yang lebih jelas. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Fahrudin (2012: 66) adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menhubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan.

3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Pekerjaan sosial juga merupakan salah satu diantara kegiatan dalam pemberian pelayanan sosial (*social services*). Pelayanan sosial mempunyai bermacam-macam bentuk sesuai dengan fungsi-fungsinya menurut Max Siporin dalam Huraerah (2011: 39) yaitu:

- a. Pelayanan akses (*access service*), mencakup pelayan informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
- b. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang usia lanjut (*jompo*), dan sebagainya.
- c. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat penitipan bayi/anak, KB (Keluarga Berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya.

Dari ketiga fungsi tersebut, semuanya merupakan kebutuhan sosial setiap masyarakat, dan secara tersirat bahwa fungsi pekerjaan sosial ini memberikan pelayanan atau informasi bagi setiap masyarakat yang datang ke pekerja sosial atau lembaga kesejahteraan sosial.

2.2.3 Peran Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial memiliki beberapa tugas, diantaranya adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memecahkan masalah. Ada saatnya seseorang mengalami ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas kehidupan dan mengalami ketidakberfungsian karena masalah fisik, emosional, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pekerja sosial memiliki tugas dan tanggung jawab

untuk membantu klien dalam penyelesaian masalahnya sehingga terpenuhi keberfungsian sosialnya sebagai suatu kewajiban dari sebuah profesi pekerjaan sosial. Menurut Pujileksono (2017: 165) menyatakan bahwa peranan-peranan pekerja sosial meliputi:

1. Perantara (*Broker*)
Pekerja sosial berperan menjadi penghubung klien dengan sistem sumber yang dibutuhkan karena oada umumnya mereka tidak mengetahui ketersediaan sumber yang digunakan untuk pelayanan masyarakat. Ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan pekerja sosial sebagai broker, yaitu:
 - a. Mampu mengidentifikasi dan melokalisasi sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat.
 - b. Mampu menghubungkan klien dengan sumber secara konsisten.
 - c. Mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.
2. Pemungkin (*Enabler*)
Peranannya adalah memberikan dorongan dan saran-saran pada sistem penerima pelayanan sehingga memungkinkan dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan dan memecahkan masalah.
3. Penghubung (*Mediator*)
Peranan yang dilakukan adalah membantu menyelesaikan konflik di antara dua sistem atau lebih. Pekerja sosial tetap memelihara posisi netral tidak memihak pada salah satu pihak. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak/kesepakatan, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik.
4. Pendidik (*Educator*)
Pekerja sosial sebagai pendidik membantu penerima layanan baik secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk melakukan perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa menjadi bisa , dari tidak terampil menjadi terampil.
5. Fasilitator
Pekerja sosial membantu klien untuk memfasilitas penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan mencapai keberfungsian sosial. Peranan fasilitator merupakan peranan yang bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan sehat dengan cara menyediakan atau memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan klien untuk mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.
6. Pembela (*Advokat*)

Peranan pekerja sosial sebagai advokat adalah untuk memberikan nasehat guna mendukung, membela, dan melindungi kepentingan klien. Peran sebagai advokat lebih menitikberatkan pada upaya pembelaan kepentingan klien untuk mendapatkan keadilan sosialnya.

Berdasarkan hal tersebut, peranan-peranan yang di jalankan atau dilakukan oleh seorang pekerja sosial merupakan peranan yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membantu klien baik itu individu, kelompok, dan masyarakat untuk mengembalikan mereka agar dapat berfungsi secara sosial kembali di dalam lingkungannya, agar dapat terpenuhi kebutuhannya dan dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki.

2.2.4 Metode Intervensi Pekerjaan Sosial

Metode intervensi pekerjaan sosial dalam ilmu kesejahteraan sosial merupakan suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari individu, kelompok, dan masyarakat. Menurut Rukminto (2013: 161) menyatakan bahwa metode intervensi sosial, sebagai berikut:

- a. Intervensi Sosial pada Individu dan Keluarga (*Casework*)
Metode intervensi sosial pada individu pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu (*individual social functioning*) agar individu dan keluarga tersebut dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individu mereka. Dalam hal ini keluarga menjadi fokus intervensi karena masalah yang dihadapi individu biasanya dipengaruhi oleh anggota keluarga mereka.
- b. Intervensi sosial kelompok (*Social Groupwork*)
Metode intervensi sosial pada kelompok merupakan suatu metode yang dilakuaka terhadap seseorang dalam suatu kelompok untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya di dalam kelompok. Dengan kata lain, metode sosial kelompok adalah suatu metode untuk mengembangkan relasi sosial dimana kelompok digunakan sebagai medianya karena kelompok memiliki kekuatan terhadap pada anggotanya itu sendiri.
- c. Intervensi sosial dalam komunitas dan organisasi (*Community Organization Community Development*)
Metode intervensi sosial komunitas merupakan metode yang diarahkan pada upaya mengubah masyarakat di tingkat yang lebih luas seperti di tingkat

provinsi. Dengan kata lain, metode intervensi ini berfokus pada strategi dalam pengembangan masyarakat, seperti pembangunan ekonomi, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan sosial rakyat di suatu negara.

Berdasarkan hal tersebut, metode-metode intervensi yang ada biasanya digunakan oleh pekerja sosial dalam membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya. Dengan adanya metode tersebut, pekerja sosial dapat menentukan tindakan apa yang akan diberikan kepada individu, kelompok dan masyarakat yang memiliki permasalahan agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.

2.3 Tinjauan tentang Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial merupakan resultan dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial dan sebagainya. Menurut Suharto (2014: 28) menyatakan bahwa: “sebagai kemampuan (orang, individu, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan dan menghadapi goncangan”.

Keberfungsian sosial merupakan hasil atau produk dari aktivitas orang dalam berelasi dengan sekelilingnya. Jadi, keberfungsian sosial berkaitan dengan hasil interaksi orang dengan lingkungan sosial. Menurut Achlis (2011: 32) menyatakan keberfungsian sosial bahwa: “kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan

peranannya selama berinteraksi dalam situasi sosial tertentu berupa adanya rintangan dan hambatan dalam mewujudkan nilai dirinya mencapai kebutuhan”.

Berdasarkan hal tersebut, adanya interaksi yang kondusif akan menyebabkan orang mampu memenuhi kebutuhan, melaksanakan tugas, dan mencapai tujuan hidupnya. Akan tetapi sebaliknya, jika interaksi yang dilakukannya kurang baik atau tidak kondusif, maka akan menyebabkan orang tersebut mengalami masalah. Menurut Guzman dalam Mardiana (2010: 24) menyatakan indikator keberfungsian sosial dapat dilihat dari aspek sebagai berikut:

- a. Sebagai kemampuan untuk melaksanakan peranan sosial
Kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan status sosialnya, yang meliputi:
 1. Kemampuan dalam melaksanakan peranan sebagai orang tua.
 2. Kemampuan dalam melaksanakan peranan sebagai istri/suami.
 3. Kemampuan dalam melaksanakan peranan sebagai kepala keluarga/ibu rumah tangga.
 4. Kemampuan melaksanakan peranan sebagai warga masyarakat yang baik.
 5. Kemampuan dalam melaksanakan peranan sebagai anggota keluarga.
- b. Sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
 1. Kebutuhan pokok (papan, sandang dan pangan).
 2. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
 3. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.
- c. Sebagai kemampuan untuk memecahkan permasalahan sosial
 1. Kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan, baik secara ekonomi maupun psikososial.
 2. Kemampuan dalam masyarakat.

Ketidakmampuan dalam melakukan peranan sosial ini dimungkinkan karena mereka menghadapi atau mempunyai permasalahan dan keterbatasan yang ada dalam dirinya dan juga dilingkungan sekitarnya. Selain itu, mereka juga memiliki pikiran yang khas tentang status sosialnya, padahal status sosial tersebut berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

2.4 Tinjauan tentang Perlindungan Sosial

2.4.1 Pengertian Perlindungan Sosial

Terdapat beragam definisi tentang perlindungan sosial (*social protection*) yang dikemukakan oleh beberapa ahli, institusi dan negara. Keragaman ini dipengaruhi oleh spesifikasi kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada suatu wilayah. Arti luas perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang-orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan dan meningkatkan status dan hak sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat.

Perlindungan sosial merupakan elemen penting bagi strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, menurut Suharto (2011: 88) menyatakan bahwa perlindungan sosial adalah: “satu tipe sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko sosial, ekonomi dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka”.

Definisi perlindungan sosial selain politik yang bersifat formal, perlindungan sosial juga mencakup praktek-praktek informal seperti sistem gotong royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman, serta skema-skema jarring

pengaman sosial yang berbasis masyarakat (*community-based safety nets*) lainnya.

Menurut Suharto (2009: 3) menyatakan bahwa:

Perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan penuh resiko, serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marginal setiap negara.

Guna mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan, dalam pelaksanaannya strategi ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain, seperti penyediaan pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan secara terintegrasi dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Suharto (2009: 42) menyatakan bahwa: “segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik aspek fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan”.

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan yang dilakukan untuk merespon kerentanan dan kesengsaraan kelompok miskin, baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Suharto (2009: 42) menyatakan bahwa tujuan utama perlindungan sosial, sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan.
2. Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakmampuan ekonomi.
3. Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari generasi ke generasi lain.

Manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Selain itu, manusia juga dapat menjangkau, memanfaatkan dan memobilisasi aset dan sumber-sumber yang ada disekitar dirinya. Dalam hal ini, perlindungan sosial juga terdapat dalam Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan perlindungan sosial, yaitu: “semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal”.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi sasaran perlindungan sosial oleh Negara adalah individu, kelompok dan masyarakat. Setiap warga negara rawan terhadap resiko sehingga diperlukan perlindungan berupa bantuan sosial dalam menangani resiko dan advokasi sosial guna tercapainya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar.

2.4.2 Bentuk Perlindungan Sosial

Berbagai penelitian memberi saksi bahwa perlindungan sosial dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi modal manusia, peningkatan produktivitas, dan pengurangan kerentanan warga negara terhadap beragam resiko yang mengancam kehidupan. Menurut ADB dalam Suharto (2013: 45) menyatakan bahwa perlindungan sosial mencakup lima elemen, yaitu:

1. Pasar Tenaga Kerja (*labour market*)
Pekerjaan pada dasarnya merupakan perlindungan sosial yang penting bagi setiap individu. Perlindungan sosial harus menyentuh aspek pekerjaan. Pekerjaan yang memberi penghasilan memungkinkan seseorang dan keluarganya memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi resiko. Skema pasar

kerja dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan mempromosikan operasi pasar kerja yang efisien. Sasaran utamanya adalah populasi usia kerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, menganggur atau setengah menganggur. Kebijakan dan program pasar kerja dapat menunjang perlindungan sosial yang mencakup:

- a. Asesmen pasar kerja yang dapat memetakan kecenderungan demografi, pengangguran, sektor-sektor penyerap tenaga kerja, aliran migrasi, dan jumlah serta penyebab tumbuhnya sektor informal.
- b. Program pasar kerja yang aktif yang mencakup; promosi UKM, padat karya, pertukaran kerja, pelayanan kerja yang menghubungkan antara pencari dan pemerlu kerja.
- c. Program pasar kerja pasif bila mencakup; asuransi pengangguran, dukungan pendapatan, kerangka legislasi yang tepat dan dapat menjamin keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan kerja.
- d. Keterjaminan dan keselamatan kerja. Langkah-langkah yang tepat untuk menjamin produksi barang dan jasa, kontraktor, sub kontraktor, dan konsultan mematuhi peraturan standar kerja, upah minimum, kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Asuransi Sosial (*social insurance*)

Asuransi sosial adalah skema perlindungan sosial yang diterima seseorang berdasarkan kontribusinya yang berupa premi, iuran atau tabungan. Program ini mampu mengurangi resiko melalui penyediaan tunjangan penghasilan dalam situasi sakit, cacat, kecelakaan kerja, melahirkan, menganggur, semakin tua, dan kematian. Program asuransi sosial mencakup:

- a. Asuransi atau tunjangan pengangguran untuk menghadapi keadaan tidak adanya kesempatan kerja akibat faktor structural maupun situasional.
- b. Asuransi kecelakaan kerja untuk memberi kompensasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan atau sakit terkait pekerjaannya.
- c. Asuransi kecacatan atau ketidakmampuan kerja yang biasanya dikaitkan dengan pension hari tua atau memberi kompensasi sebagian atau seluruh kegiatan akibat kecacatan.
- d. Asuransi kesehatan untuk melindungi orang dari prnyakit atau dari kehilangan pendapatan atau aset akibat mengalami sakit.
- e. Asuransi hari tua untuk memberikan tunjangan penghasilan setelah pension.
- f. Asuransi kelangsungan hidup yang dapat menjamin keluarga atau anak-anak yang menjadi tanggungan dapat hidup layak akibat pencari nafkah utama meninggal atau kehilangan penghasilan akibat kecacatan permanen.

3. Bantuan Sosial (*social assistance*)

Bantuan sosial atau yang kerap disebut juga sebagai bantuan publik (*public assistance*) dan pelayanan kesejahteraan (*welfare services*) mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang ditujukan untuk membantu individu, keluarga dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat

memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Program-program bantuan sosial mencakup berbagai jenis tindakan publik yang didesain untuk mentransfer sumber-sumber kepada orang-orang yang memenuhi syarat, yakni mereka yang lemah dan rentan, seperti anak-anak, korban peran atau korban bencana alam atau sosial, dan lain-lain. Mereka memiliki hak-hak sosial yang wajib dipenuhi negara terlepas dari ketidakmampuannya memberi kontribusi premi. Bentuk-bentuk bantuan sosial berupa:

- a. Transfer uang atau barang, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kupon makanan atau pemberian kursi roda, tongkat, dan computer braille bagi penyandang cacat atau ODKK.
 - b. Pelayanan sosial atau kesejahteraan yang berupa konseling, penyuluhan atau program, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang memadukan transfer uang (peningkatan daya beli) dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.
 - c. Subsidi temporer, seperti program raskin, minyak tanah bersubsidi, bantuan uang muka perumahan, dan penjualan sembako murah dimasa krisis.
 - d. Skema pengamanan sosial, yakni pengamanan (*safeguard*) yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan. Skema ini biasanya terkait dan sering dipadukan dengan subsidi temporer. Misalnya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), minyak tanah bersubsidi, atau sembako murah menyusul kebijakan penggunaan subsidi BBM.
4. Skema Mikro dan Berbasis Komunitas (*micro and area-based schemes to protect communities*)

Perlindungan sosial skema mikro dan berbasis komunitas memberi perlindungan terhadap sekelompok orang. Tujuannya untuk merespon kerentanan dalam skala komunitas. Pada awalnya, program-program ini dikembangkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi petani di pedesaan dan pekerja sektor informal di perkotaan. Ada beberapa bentuk perlindungan sosial mikro berbasis komunitas, yaitu:

- a. Asuransi mikro. Skema-skema berbasis kontribusi dan sukarela yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dalam menghimpun dana untuk mengatasi resiko-resiko pada skala komunitas. Tujuan utama skema ini adalah untuk membantu para anggotanya menghadapi masalah ketiadaan dana yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti biaya pengobatan, kematian, penguburan. Sekelompok pedagang kaki lima di banyak negara menyelenggarakan asuransi mikro yang biasanya dibantu hibah oleh pemerintah.
- b. Asuransi pertanian. Mekanisme penghimpunan dana yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kerugian akibat kejadian-kejadian alam dan sosial.
- c. Dana sosial berbasis masyarakat. Lembaga-lembaga yang dikelola komunitas setempat untuk memberdayakan warga melalui penyediaan dana

bagi kegiatan-kegiatan skala kecil, seperti pembangunan fasilitas umum atau usaha ekonomi produktif.

- d. Manajemen kebencanaan. Skema ini sangat penting dalam membantu masyarakat menghadapi dan mengurangi resiko bencana, terutama bagi mereka yang mengalami hambatan mobilitas, seperti ODKK, anak-anak dan lanjut usia. Para korban bencana umumnya dibantu oleh program-program bantuan sosial kedaruratan.

5. Perlindungan anak (*child protection*)

Anak-anak penyandang cacat atau anak dengan kemampuan khusus (AKK) adalah sub kelompok atau bagian dari populasi ODKK yang memiliki hak dan kebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, rekreasi dan perlindungan. Banyak kecacatan pada anak disebabkan oleh kekurangan gizi, penyakit dan kecelakaan yang sejatinya dapat dicegah. Tidak sedikit pula kecacatan pada anak yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata dan kekerasan politik. Terdapat sekitar empat juta anak di dunia yang mengalami kecacatan fisik dan mental akibat peperangan dan konflik bersenjata. Kebijakan perlindungan sosial bagi anak sebaiknya terintegrasi dengan kebijakan lainnya. Beberapa kebijakan perlindungan anak yang bisa dikembangkan bagi AKK antara lain:

- a. Program pengembangan anak usia dini untuk menjamin perkembangan psikomotor dan mental anak melalui perbaikan gizi, makanan tambahan, pencegahan penyakit, beasiswa, tunjangan pendidikan, pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus.
- b. Bantuan sosial keluarga melalui pemberian bantuan uang, barang atau pelayanan rawatan anak bagi keluarga yang memiliki AKK, pemberian bantuan makanan atau peralatan yang diperlukan AKK.
- c. Advokasi sosial melalui kampanye dan peningkatan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan lembaga pelayanan untuk memperkuat inklusifitas AKK, seperti menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak, pekerja anak, dan diskriminasi serta eksploitasi terhadap AKK.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dalam perlindungan sosial dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi modal manusia, peningkatan produktivitas, dan pengurangan kerentanan warga negara terhadap beragam resiko yang mengancam kehidupannya. Sejalan dengan menguatnya proses urbanisasi, industrialisasi dan globalisasi, sistem perlindungan formal yang bersifat

public atau swasta kemudian dikembangkan untuk melengkapi atau memperkuat ketahanan sosial masyarakat dari berbagai macam resiko.

2.5 Tinjauan tentang Pekerja Migran

2.5.1 Pengertian Pekerja Migran

Pekerja migran (*migrant workers*) adalah sebuah istilah formal yang digunakan oleh *International Convention on the Protection of the Rights Of All Migrant Workers and Members of Their Families* yang diadopsi oleh *UN General Assembly* dalam Agiati (2010: 21) yang menyatakan bahwa:

“istilah *migrant workers* didefinisikan sebagai *a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a state of which he or she is not a national*. Artinya pekerja migran adalah seseorang yang menjadi terlibat, dilibatkan atau telah terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan gaji (mendapat upah) dalam suatu negara dimana ia bukan warga negaranya”

Dapat dikatakan pula pekerja migran merupakan sebutan bagi masyarakat yang bekerja di luar negara asalnya. Biasanya kita memberi sebutan pekerja migran tersebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) dalam Kolopaking (2015: 11) menyatakan bahwa: “migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan/migrasi yang dilakukan orang dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan”.

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut. Menurut Agiati (2010:

61) menyatakan bahwa: “pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.”

Menurut pasal 1 ayat 2 UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam Kolopaking (2015: 10) menyatakan bahwa: “Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah”. Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Dan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna adalah setiap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah kembali ke Indonesia baik karena telah selesai masa perjanjian kerja maupun karena sebab lain.

2.5.2 Faktor Daya Tarik Menjadi Pekerja Migran

Menjadi pekerja migran sangat diminati banyak orang di Indonesia, banyak alasan orang menjadi pekerja migran di berbagai negara, menurut Agiati (2010: 3) diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

Tekanan ekonomi menjadi alasan bagi mereka untuk menjadi pekerja migran, mereka mau bekerja di luar negeri sekalipun sampai harus meninggalkan keluarganya untuk waktu yang tidak pasti. Jenis pekerjaannya mayoritas berupa PRT, ada juga yang bekerja di pabrik atau perusahaan elektronik dan buruh perkebunan. Karena daya tariknya cukup tinggi, dimana mereka ditawarkan gaji yang tinggi bila dibandingkan dengan gaji di Indonesia. Mereka berharap dapat mengirim gajinya untuk keluarganya.

2. Faktor Demografi

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat, mengakibatkan banyaknya jumlah angkatan kerja, sementara kesempatan yang ada sangat terbatas. Akibatnya jumlah pengangguran semakin banyak, ditambah lagi banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah bila kondisi perekonomian negara tidak membaik. Terjadi persaingan yang ketat untuk mendapatkan posisi kerja yang ada, salah satunya kesempatan bekerja di luar negeri dengan tawaran gaji yang menggiurkan.

3. Faktor Geografi

Kondisi geografi daerah asal juga menjadi salah satu alasan mereka menjadi pekerja migran, seperti terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka kehilangan lahan mata pencahariannya. Ada pula yang disebabkan karena kondisi alamnya yang tidak subur atau tandus, mengakibatkan mereka mendaftarkan dirinya menjadi pekerja migran yang banyak ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, dari aspek geografi ini juga bisa dilihat dari letak daerah asal mereka yang berdekatan dengan tujuan bekerja merupakan salah satu alasan mengapa mereka mau menjadi pekerja migran di negara tetangga.

4. Faktor Sosial

Terjadinya konflik sosial di daerah asal mereka menyebabkan mereka ingin keluar, karena merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan lingkungannya salah satu jalan keluarnya adalah merantau ke negara orang. Konflik sosial juga dapat berakibat kehilangan mata pencaharian, karena terjadi kerusakan pada berbagai sarana dan prasarana infrastruktur yang ada mengakibatkan banyak orang di daerah yang bersangkutan bermigrasi ke negara tetangga mencari lapangan pekerjaan.

Adakalanya seseorang cukup memiliki satu alasan saja dari sekian banyak hal untuk menjadi pekerja migran, sedangkan untuk yang lainnya bisa lebih dari satu alasan, jadi untuk setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung dari kondisinya masing-masing. Selain alasan-alasan tersebut, ada faktor lain yang menjadi pendorongnya yaitu adanya keinginan yang kuat dari dalam diri orang yang bersangkutan.

2.5.3 Kategori Pekerja Migran

Seseorang yang memutuskan atau memilih untuk bekerja di luar negaranya sebagai pekerja migran pasti karena didasari oleh berbagai macam hal. Mereka yang

memilih pekerjaan seperti itu sudah pasti juga memiliki kemampuan atau keterampilan yang bisa mereka gunakan. Pekerja migran yang berasal dari mana pun memiliki beberapa kategori, menurut Agiati (2010: 21) menyatakan bahwa diantaranya:

1. Pekerja migran profesional (*professional migrant workers*)
Pekerja migran profesional adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian berdasarkan latar belakang pendidikan formal, seperti dokter, psikolog, ahli gizi, *social worker*, *informatic engineer*, dan sebagainya yang bekerja di suatu negara bukan negaranya.
2. Pekerja migran terlatih (*skilled migrant workers*)
Pekerja migran terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus bersertifikat, seperti montir, *baby sitter*, teknisi elektronik, tata boba dan sebagainya yang bekerja di suatu negara bukan negaranya.
3. Pekerja migran untuk pekerjaan rumah tangga (*foreign domestic helpers*)
Pekerja migran untuk pekerjaan rumah tangga (di Indonesia pembantu rumah tangga) adalah tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan spesifik, bekerja di suatu negara bukan negaranya, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.

Berdasarkan kategori-kategori pekerja migran tersebut, pekerja migran profesional dan pekerja migran terlatih tidak banyak mengalami permasalahan yang berkaitan dengan kehidupannya di negara tujuan. Selain itu, berdasarkan isu-isu yang terjadi di negara-negara tujuan berkaitan dengan pekerja migran terdapat dua kategori menurut Agiati (2010: 22) menyatakan bahwa:

Pekerja migran legal adalah tenaga kerja yang bekerja di suatu negara bukan negaranya dengan menempuh prosedur keimigrasian secara formal serta memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap dan otentik seperti passport, visa, dan lain-lain yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Pekerja migran illegal adalah tenaga kerja yang bekerja di suatu negara bukan negaranya tanpa menempuh prosedur keimigrasian secara formal dan tidak memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap dan otentik seperti passport, visa, dan lain-lain yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa mereka para pekerja migran yang banyak mengalami permasalahan ketika bekerja di luar negaranya merupakan para pekerja migran yang ilegal. Para pekerja migran ilegal tersebut cenderung memaksakan untuk tetap bekerja di luar negaranya tanpa mematuhi berbagai persyaratan yang ada sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan.